

**PENGARUH PERSEPSI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PENGENDALIAN INTERNAL, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN**

**(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten
Banjarnegara)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

JAN QOMATULLAH ALDYTH PRANATANA

B 200 110 364

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PERSEPSI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PENGENDALIAN INTERNAL, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kabupaten Banjarnegara**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

JAN QOMATULLAH ALDYTH PRANATANA
B200 110 364

Telah diperiksa, disetujui, dan diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. Wahyono, MA, Ak CA
NIDN: 0009035801

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PERSEPSI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PENGENDALIAN INTERNAL, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banjarnegara)**

Yang ditulis oleh :

JAN QOMATULLAH ALDYTH PRANATANA
B200 110 364

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 14 Agustus 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Andy Dwi Bayu Bawono, SE, M.Si., Ph.D
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Triyono, S.E., M.Si.
(Anggota II Dewan Penguji)
3. Dra. Mujiyati, M.Si.
(Anggota II Dewan Penguji)



(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



Dr. Syamsudin, M.M

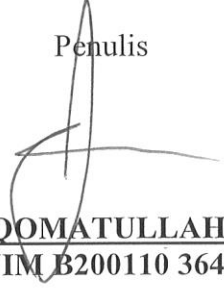
PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Agustus 2018

Penulis



JAN QOMATULLAH A.P
NIM B200110 364

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENGENDALIAN INTERNAL, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(Studi Pegawai Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banjarnegara)

Abstrak

Akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan berusaha untuk mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah. Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh persepsi pada kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, teknologi informasi dan pengawas keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/penatausahaan keuangan di 35 OPD dan 3 kantor kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Sampel dalam penelitian ini adalah 114 pegawai dari 35 OPD dan 3 kantor kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi linier berganda dengan metode *ordinary least square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal dan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, adapun pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kata kunci: kompetensi, pengendalian internal, teknologi informasi, pengawasan, kualitas laporan keuangan daerah.

Abstract

Public accountability is an obligation of the holder of the trust to give accountability, presenting, reporting and striving to disclose all activities and activities that are its responsibility to the party providing the trust. This study aims to influence perceptions on the competence of human resources, internal control, information technology and regional financial supervisors on the quality of financial statements in OPD Banjarnegara District. This research is a kind of quantitative research. Population in this research is employee of accounting / finance department at 35 OPD and 3 sub-district office in Banjarnegara Regency. The sample in this research is 114 employees from 35 OPD and 3 sub-district office in Banjarnegara Regency. The sampling technique in this research is total sampling. This study used multiple linear regression analysis tool with ordinary least square method (OLS). The result of the research shows that the competence variable of human resources, internal control and information technology have positive and significant effect to the quality of regional financial report, while the supervision of regional finance does not affect the quality of regional financial report.

Keywords: competence, internal control, information technology, supervision, quality of regional financial report.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, menyebabkan kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik. Akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan berusaha untuk mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Upaya yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Menurut Mahmudi (2011:143), laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pekerjaan tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pegawai yang bekerja dalam pengelolaan keuangan harus memiliki kompetensi yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Jika yang terjadi sebaliknya, maka pemanfaatan teknologi justru akan mempersulit pekerjaan pegawai.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 yaitu penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan untuk mendukung

Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran, pelaksanaan anggaran, dan Pelaporan Keuangan Daerah.” Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 51 Tahun 2010 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2011 pasal 8 menyebutkan bahwa “Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Pengendalian internal juga sangat diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan. Selain itu, pengawasan keuangan daerah juga sangat berperan. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah “Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan”.

Pemerintah kabupaten Banjarnegara meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014. Ini adalah kali keempat secara berturut-turut Banjarnegara mendapat predikat bergengsi terkait kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut pada Rabu (27/5/2015), Banjarnegara bersama tiga kabupaten lain, yakni Blora, Pemasang, dan Wonogiri diundang ke kantor BPK perwakilan Jawa Tengah untuk penyerahan hasil penilaian BPK. Namun hanya dua kabupaten, yakni Banjarnegara dan Blora yang mendapat predikat WTP (Bambang, 2015)

Opini WTP yang diperoleh sesuai dengan ketentuan BPK yang ditinjau dari: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, (4) efektivitas pengendalian internal Sesuai peraturan pemerintah dengan dipakainya accrual basis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banjarnegara memanfaatkan aplikasi Sistem

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam menyusun laporan keuangan. Tujuan pengembangan program aplikasi sistem informasi manajemen daerah ini adalah: (1) Menyediakan data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah. (2) Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. (3) Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 prinsip akuntansi dan pelaporan salah satunya terdapat prinsip penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Namun pada kenyataannya di Kabupaten Banjarnegara laporan anggaran 2016 belanja daerah lebih besar dari pada pendapatannya.

Berdasarkan hasil pra survei terkait dengan kualitas laporan keuangan diketahui bahwa ada beberapa kantor yang hanya satu komputer yang terhubung internet. Pegawai kurang mendapatkan sosialisasi aplikasi terbaru dan pegawai juga kurang dalam mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kapasitas sumber daya manusia yang rendah dalam mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang menyebabkan tumbang tindih jabatan/rangkap jabatan seperti yang terjadi di salah satu kantor OPD di Banjarnegara. Hal ini mengidentifikasikan masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia, dan lemahnya pengendalian internal. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk memilih Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai objek untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang disebutkan yaitu mengenai Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: (1) Mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kabupaten Banjarnegara. (2) Mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap

kualitas laporan keuangan di OPD Kabupaten Banjarnegara. (3) Mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kabupaten Banjarnegara. (4) Untuk mengetahui pengaruh pengawas keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kabupaten Banjarnegara.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Agensi

Mardiasmo (2004), menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

2.2 Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2013:40), akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (Keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang memerlukan. Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang.

2.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Gubernur/Bupati/Walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK serta koreksi lain berdasarkan SAP. Berdasarkan Laporan

Keuangan yang telah diaudit BPK, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Nordiawan, 2009:175).

2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Siti dan Ely (2010:225), kompetensi merupakan pengetahuan dan keahlian serta ketrampilan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepada individu. Manajemen mempekerjakan karyawan berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki karyawan, dan menempatkan pada pekerjaan yang tepat dan sesuai dengan kompetensinya, hal ini untuk menjaga pengendalian internal pada tujuan yang diharapkan.

2.5 Pengendalian Internal

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) tahun (2013) dalam Afiah dan Rahmawati (2014), menyatakan pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, manajemen, dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. *Certified American Institute of Public Accountants (AICPA)* menyatakan pengendalian internal terdiri rencana organisasi dan koordinat metode serta langkah-langkah diadopsi dalam bisnis untuk menjaga asetnya, memeriksa akurasi dan keandalan akuntansi data, meningkatkan efisiensi operasional, dan patuh terhadap kebijakan manajerial yang ditentukan.

2.6 Teknologi Informasi

Menurut Jogiyanto (2008:3), teknologi informasi adalah sub-sistem atau sistem bagian dari sistem informasi. Sistem informasi mempunyai beberapa komponen atau bagian dan salah satu dari komponen dari sistem informasi adalah teknologi atau teknologi informasi. Perusahaan yang memiliki teknologi informasi yang canggih (terkomputerisasi dan terintegrasi) dan didukung oleh aplikasi pendukung teknologi moderen, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan kinerja perusahaan dengan menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya.

2.7 Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam seminar Undang-undang Perbendaharaan Negara, tanggal 30 Agustus 1970: “Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah

pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan”.

Menurut Baswir (2000 :117-128), Pengawasan menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu (1) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Pengawasan ini pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. (2) Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara. Pengawasan ini biasanya dilaksanakan setelah dilakukan tindakan yaitu dengan membandingkan antara hal yang telah terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Hevesi 2005; dalam Nuryanto dan Afiyah 2013, Dengan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan akuntansi, nilai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan meningkat sehingga dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam membuat keputusan yang tepat.

H₁: Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.8.2 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengendalian Internal adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Krismiaji 2005: 218), Pengendalian internal yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten.

H₂: Variabel Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.8.3 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

H₃: Variabel teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.8.4 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Primayana, Atmadja, Darmawan (2014), semakin baik pengawasan keuangan daerah maka akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam pelaporan keuangan yang menjadi lebih andal. Pengawasan keuangan daerah yang baik akan berguna untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, juga untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya pada pemerintah daerah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan pemerintah yang baik dalam hal ini tercermin dalam pelaporan keuangan yang andal.

H₄: Variabel Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Objek Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro, 2014: 26). Waktu yang direncanakan dimulai dari penyusunan proposal penelitian sampai terlaksananya penelitian ini, yaitu pada bulan Oktober 2017 sampai Desember 2017. Tempat Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari kantor Kecamatan dan kantor Badan yang ada di

Kabupaten Banjarnegara dan kantor Dinas yang berada di Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Banjarnegara.

3.2 Sampel dan Teknik Sampling

Sampel dalam penelitian ini adalah 76 pegawai dari 35 OPD di Kabupaten Banjarnegara. Responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan dan bendahara yang terlibat dalam penyusunan pelaporan keuangan pada OPD Kabupaten Banjarnegara. Teknik pengumpulan sampel adalah cara penentuan dan pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan teknik *proportionate stratified random sampling*. Alasan mengambil *probability sampling* dengan teknik *proportionate stratified random sampling* karena populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.

3.3 Data dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner. Kuesioner merupakan suatu metode pengumpulan data yang berisi tanggapan/respon tertulis yang diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis (kuisisioner) yang diajukan peneliti (Indriantoro, 2014: 145). Sehingga data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada karyawan bagian akuntansi/administrasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah 76 responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner. Pengukuran variabel menggunakan skala likert, merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu (Indriantoro, 2014 :104). Skala likert umumnya menggunakan lima angka penilaian, yaitu: Sangat tidak setuju (skor 1), Tidak setuju (skor 2), Ragu (skor 3), Setuju (skor 4), Sangat setuju (skor 5).

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Indikator dari kualitas laporan keuangan daerah adalah: 1) laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan dimasa lalu; 2) penyajian/penerbitan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan periode

akuntansi; 3) laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan; 4) laporan keuangan menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan; 5) laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya; dan 6) informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan dipahami dengan jelas (Baridwan, 2010: 17).

3.5.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi merupakan karakteristik dari orang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Indikator kompetensi sumber daya manusia adalah: 1) memiliki pengetahuan yang baik di bidang akuntansi; 2) merupakan lulusan program/prodi akuntansi; 3) mempunyai sumber daya manusia yang mampu menyusun LKPD sesuai dengan Standar Akuntansi; 4) membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukannya; 5) peran dan tanggung jawab seluruh pegawai sub bagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah; 6) mempunyai banyak pengalaman dalam pembuatan laporan keuangan; dan 7) mampu menyelesaikan tugas (pembuatan laporan keuangan) dengan tepat waktu (Nuryanto dan Afiyah, 2013: 32).

3.5.3 Pengendalian Internal

Pengendalian Internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan -tujuan berikut ini: 1) keandalan pelaporan keuangan; 2) menjaga kekayaan dan catatan organisasi; 3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan; 4) efektivitas dan efisiensi operasi (Siti dan Ely, 2010:221).

3.5.4 Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan komputer, *software*/perangkat lunak, dan lainnya yang sejenis secara optimal. Indikator teknologi informasi adalah 1) Sub bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas; 2) jaringan Internet telah terpasang di unit kerja; 3) jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai

penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan; 4) proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi; 5) pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software/aplikasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6) adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur; dan 7) peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.

3.5.5 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator pengawasan keuangan daerah adalah 1) pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 2) evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran dilakukan (triwulan, semester, tahunan); 3) setiap transaksi keuangan telah dicatat dan setiap pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup; 4) pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan tepat waktu dan diklasifikasikan dengan benar; 5) bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar pencatatan telah diarsipkan dengan baik sehingga mudah ditemukan biladiperlukan; 6) terdapat sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas; 7) laporan keuangan tiap OPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta disusun secara tepat waktu.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, untuk menghitung besarnya kuantitatif dari suatu perubahan kejadian, variabel independen terhadap variabel dependen. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi linier.

Uji Kualitas Data. Data dalam penelitian ini merupakan data primer, yang mana digunakan dua konsep untuk menguji kualitas datanya, yaitu dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk mengetahui validitas kuesioner dilakukan dengan

teknik korelasi *Pearson Product Moment*, yaitu cara melakukan korelasi antara skor masing-masing variabel atau pertanyaan dengan skor totalnya. Sedangkan untuk mengetahui reliabilitas kuesioner dilakukan dengan teknik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

Uji Asumsi Klasik. Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Untuk melihat normalitas adalah dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov*. Uji multikolinearitas bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dengan menggunakan uji *glejser*.

Uji Hipotesis. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara sistem pengendalian manajemen, sistem pengukuran kinerja, dan sistem penghargaan (*reward*), terhadap kinerja manajer unit. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis adalah:

$$Y = \alpha + \beta_{1SDM} + \beta_{2PI} + \beta_{3TI} + \beta_{4PKD} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Kualitas Laporan Keuangan
SDM	= Sumber Daya Manusia
PI	= Pengendalian Internal
TI	= Teknologi Informasi
PKD	= Pengawasan Keuangan Daerah
α	= Konstanta
β	= Koefisien arah regresi
e	= error

Pengujian koefisien regresi parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah secara individu variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , maka dapat disimpulkan

bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:99).

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel-variabel dependen secara simultan. Uji ini juga digunakan untuk mengetahui apakah model regresi *fit of goodness* atau tidak. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka terdapat pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah *fit of goodness*. Sebaliknya, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen (tidak *fit of goodness*) (Ghozali, 2011:98).

Pengujian koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap naik atau turunnya variabel dependen. Dalam persamaan regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka nilai R^2 yang baik digunakan untuk menjelaskan persamaan regresi adalah koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted- R^2*), karena telah memperhitungkan jumlah variabel independen dalam suatu model regresi (Ghozali, 2005:108). Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1 atau $0 \leq R^2 \leq 1$. Apabila R^2 mendekati 1, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen. Sebaliknya, jika R^2 mendekati 0, maka variasi dari variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen yang dimunculkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Proses pengumpulan data dapat dilihat pada tabel IV.1.

Tabel 1
KUESIONER YANG DISEBAR

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kuesioner yang disebar	76
2.	Data yang diperoleh	76
3.	Data yang tidak kembali	0
4.	Jumlah data yang dapat dianalisis	70

Sumber: Data primer diolah penulis, 2018.

4.2 Metode Analisis Data

4.2.1 Pengujian Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Tabel 2
Ringkasan Hasil Uji Validitas

No item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia			
1	0,790	0,235	Valid
2	0,643	0,235	Valid
3	0,513	0,235	Valid
4	0,772	0,235	Valid
5	0,732	0,235	Valid
6	0,748	0,235	Valid
Pengendalian Internal			
1	0,484	0,235	Valid
2	0,552	0,235	Valid
3	0,788	0,235	Valid
4	0,695	0,235	Valid
5	0,653	0,235	Valid
6	0,672	0,235	Valid
7	0,442	0,235	Valid
8	0,453	0,235	Valid
9	0,485	0,235	Valid
Teknologi Informasi			
1	0,703	0,235	Valid
2	0,628	0,235	Valid
3	0,693	0,235	Valid
4	0,677	0,235	Valid
5	0,649	0,235	Valid
6	0,767	0,235	Valid
7	0,819	0,235	Valid

8	0,656	0,235	Valid
Pengawasan Keuangan Daerah			
1	0,818	0,235	Valid
2	0,839	0,235	Valid
3	0,845	0,235	Valid
4	0,739	0,235	Valid
5	0,625	0,235	Valid
6	0,737	0,235	Valid
7	0,703	0,235	Valid
Kualitas Laporan Keuangan			
1	0,736	0,235	Valid
2	0,643	0,235	Valid
3	0,526	0,235	Valid
4	0,521	0,235	Valid
5	0,779	0,235	Valid
6	0,561	0,235	Valid
7	0,707	0,235	Valid
8	0,747	0,235	Valid
9	0,669	0,235	Valid
10	0,552	0,235	Valid
11	0,651	0,235	Valid

Sumber : Data Diolah Penulis 2018

Pada tabel IV.2 menunjukkan bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada masing-masing variabel dan item pernyataan. Dengan demikian semua item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner adalah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3
Hasil uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Kompetensi SDM	0,779	Reliabel
2.	Pengendalian Internal	0,735	Reliabel
3.	Teknologi Informasi	0,840	Reliabel
4.	Pengawasan Keuangan	0,875	Reliabel
5.	Kualitas Laporan Keuangan Daerah	0,859	Reliabel

Sumber: Data primer diolah penulis, 2018

Berdasarkan tabel IV.3 diketahui bahwa nilai alpha dari instrumen untuk masing-masing variabel lebih besar dari tingkat *Cronbach's alpha* yaitu 0,6

sehingga bisa dikatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam variabel penelitian ini *reliabel* dan dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.

4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4

UJI NORMALITAS

Variabel	Kolmogrov Smirnov <i>Z</i>	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,609	0,852	Normal

Sumber: Data primer diolah penulis, 2018.

Dari uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test diketahui hasil dari Asymp Sig > α , yaitu $0,609 > 0,05$ yang berarti bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5

Rangkuman Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
SDM	,687	1.455
PI	,373	2.681
TI	,417	2.400
PKD	,435	2.300

Sumber: Data primer diolah penulis, 2018.

Berdasarkan tabel IV.5 diketahui bahwa nilai *Tolerance* dan *VIF* hitung dari masing-masing variabel sesuai dengan kriteria pengujian (*Tolerance* > 0,1 dan *VIF* < 10), sehingga dapat dikatakan pada model regresi tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 6
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.540	2.240		.241	.810
Sumber Daya Manusia	-.069	.066	-.154	-1.054	.296
Pengendalian Internal	.092	.097	.188	.948	.346
Teknologi Informasi	-.111	.072	-.289	-1.546	.127
Pengawasan Keuangan Daerah	.098	.093	.194	1.057	.294

Sumber: Data primer diolah penulis, 2018.

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas, dapat dilihat pada tabel IV.6 bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai Sig > 0,05. Hal ini berarti bahwa model regresi diasumsikan tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 7
Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Df	t _{hitung}	p	Ket
Constant	6,413	65			
SDM	0,267		2,615	0,011	H ₁ diterima
PI	0,592		3,925	0,000	H ₂ diterima
TI	0,267		2,396	0,019	H ₃ diterima

PKD	0,067		0,603	0,549	H ₄ ditolak
R ²	= 0,666				
F hitung	= 35,350				
F tabel	= 2,51				
T tabel	= 1.997				

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan analisis tabel tersebut dapat dibuat rumus persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 6,413 + 0,267_{SDM} + 0,592_{PI} + 0,267_{TI} + 0,067_{PKD} + e$$

Keterangan :

Y : Kualitas Laporan Keuangan

SDM : Sumber Daya Manusia

PI : Pengendalian Internal

TI : Teknologi Informasi

PKD : Pengawasan Keuangan Daerah

E : Error

Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

4.3.1.1. Nilai konstanta untuk persamaan regresi yaitu 6,413 dengan nilai positif.

Hal ini berarti bahwa tanpa adanya kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan daerah mempunyai koefisien sebesar 6,413.

4.3.1.2.. Koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia adalah 0,267 dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Kompetensi Sumber Daya Manusia, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.3.1.3.. Koefisien regresi pengendalian internal adalah 0,592 dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian internal, maka kualitas laporan keuangan daerah semakin semakin berkualitas pula.

- 4.3.1.4.. Koefisien regresi teknologi informasi adalah 0,267 dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin memanfaatkan teknologi informasi maka laporan keuangan pemerintah daerah semakin berkualitas.
- 4.3.1.5.. Koefisien regresi pengawasan keuangan daerah adalah 0,067 dengan parameter positif. Bahwa semakin baik pengawasan keuangan daerah, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin baik.

4.3.2 Uji t

Untuk menguji hipotesis akan dilakukan uji t dengan analisis uji regresi linier berganda. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.

- 4.3.2.1.. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y), besarnya nilai t hitung untuk variabel kompetensi sumber daya manusia (SDM)= 2,165 dengan nilai $\rho = 0,005$, sedangkan t tabel df= 65 pada signifikansi $\alpha = 5\%$, Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan $t_{hitung} = 2,615$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1.997$ dan atau $\rho = 0,011 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).
- 4.3.2.2.. Pengendalian Internal (PI) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y). Besarnya nilai t_{hitung} untuk variabel pengendalian internal (PI)= 3,925 dengan nilai $\rho = 0,000$, sedangkan t_{tabel} df= 65 pada signifikansi $\alpha = 5\%$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut menunjukkan $t_{hitung} = 3,925$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1.997$ dan atau $\rho = 0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal (PI) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).
- 4.3.2.3.. Teknologi Informasi (TI) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y). Besarnya nilai t_{hitung} untuk variabel Teknologi Informasi (TI)= 2,396 dengan nilai $\rho = 0,019$, sedangkan t_{tabel} df= 65 pada signifikansi $\alpha = 5\%$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan $t_{hitung} = 2,396$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1.997$ dan atau $\rho = 0,019 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi (TI) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

4.3.2.4. Pengawasan keuangan Daerah (PKD) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y). Besarnya nilai t_{hitung} untuk variabel pengawasan keuangan daerah (PKD) = 0,603 dengan nilai $p = 0,549$, sedangkan t_{tabel} $df = 65$ pada signifikansi $\alpha = 5\%$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan $t_{hitung} = 0,603$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 1.997$ dan atau $p = 0,549 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah (PKD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

4.3.3 Uji F

Tabel 8
Rangkuman Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	567.479	4	141.870	35.350	.000 ^b
	Residual	260.864	65	4.013		
	Total	828.343	69			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal

Sumber : Data primer diolah, 2018

Uji F tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penentuan F_{tabel} adalah dengan derajat kebebasan (df) = 65 yaitu sebesar 2,51 pada taraf signifikansi 5%. Dari hasil SPSS 22 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 35,350, karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($35,350 > 2,51$) maka H_0 diterima. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan hipotesis keempatnya diterima. Hal tersebut menunjukkan

berkualitas tidaknya kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah.

4.3.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Hasil analisis diketahui nilai adjusted R^2 sebesar 0,666 atau **66,6%**. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah sebesar 66,6%. Sementara sisanya sebesar 33,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 4.4.1.. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y). Hal ini dibuktikan koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia (SDM) sebesar 0,267. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta dalam uji t diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,615 > 1,997$ dengan p value $0,011 < 0,05$ hal ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara parsial. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).
- 4.4.2.. Pengendalian internal (PI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y). Hal ini dibuktikan koefisien regresi pengendalian internal (PI) sebesar 0,592. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dalam uji t diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,925 > 1,997$ dengan p value $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara parsial. Berdasarkan

hasil pengujian hipotesis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal (PI) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

4.4.3.. Teknologi informasi (TI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y). Hal ini dibuktikan koefisien regresi teknologi informasi (TI) sebesar 0,267 yaitu menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uji t diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,396 > 1.997$ dengan p value $0,019 < 0,05$ hal ini menunjukkan terdapat pengaruh antara teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara parsial. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi (TI) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

4.4.4.. Pengawasan keuangan daerah (PKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y). Hal ini dibuktikan koefisien regresi pengawasan keuangan daerah (PKD) sebesar 0,087. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi berdasarkan uji t diketahui $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,549 < 1.997$ dengan p value $0,549 > 0,05$ hal ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara parsial. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah (PKD) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Daerah (Y).

5. KESIMPULAN

5.1 Simpulan

- 5.1.1.. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- 5.1.2.. Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- 5.1.3.. Teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

5.1.4.. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N.N., dan Rahmatika, D.N. (2014). Factors Influencing The Quality Of Financial Reporting And Its Implications On Good Government Governance. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 5, Issue 1 (Dec.) ISSN 2289-1552(2014).
- Baridwan, Z. (2010). *Intermediate Accounting*. Yogyakarta :BPFE
- Baswir, R. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta : BPFE
- Halim, A., dan Kusufi, M.S. (2013). *Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah* . Jakarta : Salemba Empat.
- Jogianto. (2008) . *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta : ANDI.
- Krismiaji .(2005) . *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : Percetaan Akedemi Manajemen Perusahaan YKPN
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., dan Rahmawati, M. (2009). *.Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuryanto, M., and Nunuy Nur Afiah. (2013). The Impact Of Apparatus Competence, Information Technology Utilization And Internal Control On Financial Statement Quality (Study On Local Government Of Jakarta Province - Indonesia). *World Review of Business Research Vol. 3. No. 4. November 2013 Issue. Pp. 157 – 171*
- Primayana, K.H., Atmadja, A.T., dan Darmawan, N.A.S. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol:2 No:1 Tahun 2014*